

KORUPSI: SIMBOL IDENTITAS¹

Zainal Arifin²

Abstract

Corruption is seen by many experts has become a culture in Indonesia. Various approaches and perspectives of political science try to better understand this issue, but the issue of corruption continue to grow, particularly among officials and members of Parliament. This article tries to give a different understanding about the corruption of katamata anthropology, which views corruption as a form of social reinforcement of group identity.

Keywords : Corruption, Identity, Manipulative Strategy

A. PENDAHULUAN

“**K**orupsi lagi ... korupsi lagi”. Teriakan kekecewaan seperti ini tidak saja terdengar dari media elektronik ketika KPK kembali menangkap anggota DPR yang diduga melakukan korupsi, tetapi juga diteriakan oleh lembaga yang anti korupsi dan di masyarakat umum. Terkadang memang terasa menjengkelkan, mengapa seorang anggota DPR yang umumnya pengusaha kaya, dengan gaji dan fasilitas menjadi anggota DPR sudah sangat mencukupi, justru masih juga melakukan korupsi. Artinya motif ekonomi sulit dijadikan alasan mengapa seorang melakukan korupsi, oleh sebab itu sebahagian pengamat justru memandang perilaku korupsi ini sebagai akibat rendahnya moral seseorang. Namun argumentasi ini juga sering dipertanyakan karena justru banyak “orang alim” yang kemudian menjadi koruptor setelah masuk dalam lembaga tertentu. Para ahli lalu melihat fenomena korupsi ini sebagai sebuah sistem dimana seseorang akhirnya “terjebak” di dalamnya dan mau tidak mau akhirnya ikut menjadi koruptor. Akan tetapi pandangan ini juga sering dipertanyakan karena dalam banyak negara maju sekelas Amerika sekalipun, korupsi pun juga sering terjadi. Berangkat

dari kritik berbagai pandangan tentang korupsi tersebut, tulisan ini mencoba menawarkan cara pandang lain, dengan melihat korupsi sebagai perilaku yang sengaja dicitakan untuk menguatkan identitas dan kekuasaan sebuah kelompok.

B. KORUPSI SEBAGAI SIMBOL IDENTITAS

Korupsi adalah sebuah tindakan yang dilakukan di luar tugas-tugas formal yang seharusnya ia lakukan demi kepentingan diri atau kelompoknya sendiri dan cenderung merugikan kepentingan publik (bersama). Oleh sebab itu, tindakan seorang PNS yang “memanfaatkan” nama dan fasilitas kantornya untuk kepentingan diri dan kelompoknya, walaupun tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan kantornya, juga dianggap sebagai tindakan korupsi. Sudah banyak ulasan mengapa korupsi cenderung selalu terjadi di birokrasi dan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat Indonesia, bahkan sudah banyak upaya untuk memberantas perilaku korupsi tersebut, tetapi perilaku negatif ini tetap menjamur dan seolah semakin sulit diberantas. Upaya pantang menyerah yang dilakukan oleh KPK memang telah memberikan angin segar,

¹ Artikel ini telah disampaikan dalam Seminar “Demokrasi dan Aturan Sosial” dalam rangka Dies Natalis FISIP Unand, pada tanggal 26 April 2012 di FISIP Unand, Padang

² Penulis adalah dosen tetap jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas, Padang

akan tetapi walaupun gaungnya sudah terdengar keras, tetapi aktivitas para koruptor dalam melakukan korupsi juga tidak semakin surut.

Ini menunjukkan bahwa korupsi memang telah menjadi sebuah budaya di masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu kesulitan memberantas apalagi menghapuskan korupsi bisa dimaklumi, karena sebagai sebuah budaya, korupsi cenderung telah menjadi simbol identitas bagi sebuah kelompok dan klas. Ini misalnya ditunjukkan dengan adanya perbedaan pola dan strategi yang dilakukan para koruptor sesuai dengan kelompok dan klas sosialnya. Artinya, pola korupsi yang terjadi dalam kelompok legislatif cenderung akan berbeda dengan pola korupsi yang dilakukan kelompok eksekutif, pada kelompok yudikatif, serta berbeda juga pada kelompok pengusaha, LSM, dan ilmuwan di perguruan tinggi. Kita juga bisa mengatakan bahwa pola korupsi juga memiliki perbedaan sesuai klas sosialnya, misalnya antara klas pejabat dengan klas bawahan, antara "klas kakap" dengan "klas teri".

Korupsi sebagai sebuah identitas, juga memungkinkan terjadi dalam lintas lembaga, bahkan memungkinkan terjadi dalam kelompok-kelompok non-lembaga. Pada banyak kasus di Indonesia, korupsi sering terjadi melalui hasil sebuah aliansi antara lembaga legislatif dan eksekutif melalui proyek-proyek pemerintah. Bahkan aliansi seperti ini juga sering dilakukan antara seorang pejabat dengan tokoh di masyarakat umum. Pemikiran seperti ini membawa pemahaman kita, bahwa korupsi sebagai sebuah identitas kelompok (kroni), bisa saja ada dalam bentuk kelembagaan, pertemanan, etnisitas bahkan agama. Melalui sebuah proses, maka seseorang akan diakui sebagai bagian dari kroni tersebut, apabila ia ikut memberi peluang, membiarkan bahkan melegalkan perilaku korupsi yang dilakukan oleh anggota kroninya. Artinya norma-norma yang mengendalikan dan melegitimasi perilaku korupsi itu sendiri akan selalu mengalami proses reproduksi dan rekonstruksi sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi karena dunia korupsi adalah dunia "abu-abu", maka proses reproduksi dan rekonstruksi cenderung terjadi secara tersembunyi dan samar-samar (*hidden transcript*). Oleh sebab itu ketika seseorang

tertangkap melakukan korupsi, maka "terkesan ada kewajiban" bagi semua anggota kroninya untuk melindungi si koruptor, atau sekurang-kurang bungkam untuk tidak membua aib bagi kroninya. Begitu juga, ketika salah seorang anggotanya "berkhianat" untuk membuka aib kroninya tersebut, maka anggota-anggota lain secara komunal juga akan menyerang sang pengkhianat ini.

Pemahaman bahwa korupsi adalah simbol identitas sebuah kelompok (kroni) ini, juga terkait dengan kekuasaan yang harus mereka pertahankan dan tunjukkan terhadap kelompok atau kroni lainnya. Oleh sebab itu, korupsi yang dilakukan oleh seorang pengusaha kaya raya, memang bukan didasari oleh motif ekonomi, tetapi lebih sebagai upaya menunjukkan jati diri bahwa orang lain atau kelompok lain, harus mengakui kekuasaan diri dan kelompoknya. Keinginan untuk diakui kekuasaan ini juga yang melatari mengapa seorang pejabat kejaksaan tinggi di tingkat daerah misalnya, akhirnya mengancam seorang gubernur atau bupati apabila mereka tidak "berbagi hasil" dengan dirinya. Artinya, korupsi tidak selalu bermotif ekonomi dan jabatan, tetapi juga sering dilandasi oleh upaya seseorang atau lembaga tertentu untuk diakui kekuasaan diri dan lembaganya.

Sebagai upaya untuk meminta pengakuan diri, maka korupsi tentu saja akan mendapat perlawanan dari kelompok lain yang justru tidak menghendaki seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan tertentu. Oleh sebab itu, wacana lalu disebarluaskan dan dipopulerkan serta dilabel sebagai isu yang dianggap penting. Oleh sebab itu, jangan heran apabila seorang menteri setiap habis jabatan akan digugat ulang oleh sekelompok orang yang mana sebelumnya tidak mampu digugat karena kuatnya kekuasaan dan solidaritas yang terbangun. Berangkat dari pemikiran Foucault tentang wacana, maka siapa yang kuat (memiliki kekuasaan) maka dia lah yang akan mampu membangun wacana tersebut, dan melabel aktivitas tersebut sebagai sebuah kebenaran. Jadi apa yang dilakukan KPU (kalau memang bebas kepentingan) dalam membasmi korupsi terkadang memang harus terkalahkan dengan konsepsi penguasa yang telah

terbangun solidaritas dan identitas kelompoknya.

Munculnya korupsi sebagai symbol identitas ini, terkadang juga tidak selalu berdiri sendiri. Faktor kekuasaan yang lebih besar terkadang juga ikut mempengaruhi, yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem global, yang dipopulerkan Negara-negara barat. Ini misalnya terlihat dari bagaimana negara-negara Barat selalu mempersoalkan perlunya negara berkembang untuk selalu taat mengikuti tata aturan keuangan yang sudah dilabel oleh Barat (satu rupiah pun harus dipertanggung jawabkan). Persoalannya aturan yang dilabel Barat tersebut cenderung kaku dan menutup peluang bagi seorang mamak untuk membantu kemenakannya (karena dianggap nepotisme), serta menutup peluang bagi nilai-nilai social yang menekankan akan arti pentingnya kepemilikan material sebagai bentuk gengsi dalam masyarakatnya. Ini bukan persoalan salah dan benar, baik dan buruk, tetapi persoalan perbedaan nilai-nilai dalam memandang suatu aktivitas penggunaan dan pengaturan keuangan.

Mengikuti pemikiran Halley (2005), maka menguatnya wacana (*discourse*) Barat tentang pengendalian aliran keuangan, membuat munculnya resistensi, yang salah satunya ditunjukkan dengan terbangunnya kelompok pelaku korupsi. Melalui solidaritas antar anggota kelompok, maka identitas kemudian dibangun dan setiap aktivitas korupsi yang dilakukan kemudian dilabel sebagai sebuah kebenaran. Dengan kata lain, konsepsi dan perdebatan tentang korupsi dan tidak korupsi yang sering muncul dihadapan kita, sebenarnya hanyalah wacana yang dikembangkan pemilik kekuasaan, dengan cara melakukan pelabelan (*labelling*) dan pelegitimasi terhadap aktivitas yang mereka lakukan.

Disini wacana yang dikembangkan kemudian memberikan legitimasi dan penguatan tentang realitas yang ditampilkan, sehingga melahirkan pembenaran. Dengan kata lain, pelabelan tidak lain adalah bagaimana realitas yang ada diproduksi dan dikonstruksi secara social sehingga akhirnya dilabel sebagai milik komunal (bersama). Pelabelan yang dilakukan pemilik kekuasaan, melalui

wacana inilah yang membuat realitas korupsi akhirnya lebih menekankan aspek pembenaran daripada aspek kebenaran itu sendiri.

Pemikiran ini menunjukkan bahwa korupsi cenderung tidak terjadi secara individual, tetapi selalu dilakukan secara lembaga. Melalui proses pertukaran sosial, maka antara individu dalam kelompoknya dan antara lembaga dengan lembaga lain akan selalu membentuk dan mewujudkan diri sesuai dengan harapan masing-masing kelompok. Inilah yang membuat korupsi akhirnya sulit untuk dideteksi, karena masing-masing anggota kelompok dan masing-masing lembaga yang melakukan aliansi korupsi akan saling menguatkan satu sama lain. Dengan cara ini, maka ketika lembaga luar (*outsider*) yang mencoba membongkar aktivitas mereka, akan mendapat perlawanan, tidak saja dalam bentuk perlindungan hukum dan politis, bahkan sangat memungkinkan dalam bentuk kekerasan fisik. Oleh sebab itu, dengan semakin dekatnya pemilu, maka tugas KPK ke depan juga akan semakin sibuk. Kesibukan tersebut tidak saja disebabkan karena masih menumpuknya kasus-kasus yang belum tertangani, tetapi yang paling utama adalah kemungkinan akan munculnya kelompok-kelompok koruptor baru dengan pola identitas dan kekuasaan yang bisa saja juga baru

Oleh sebab itu, upaya penanganan korupsi tidak bisa dilakukan terhadap individu-individu tertentu saja (koruptor) tetapi harus mengarah pada kroni koruptor itu sendiri. Salah satu upaya yang bisa dilakukan antara lain dengan membongkar idiom (simbol) identitas korupsi itu sendiri. Artinya perlu ada informasi yang memadai tentang calon-calon legislatif baru, berkenaan dengan kroni yang mengelilinginya. Kroni ini tidak saja dalam bentuk partai yang mendukung dan mencalonkannya, tetapi juga etnisitas asal dari calon itu sendiri, bahkan lembaga-lembaga yang terkait dan mengaitkan diri dengan calon itu sendiri. Artinya sebagai sebuah anggota baru dalam sebuah kroni, maka seseorang sebenarnya telah menciptakan "kontrak politik" dengan kroninya. Kontrak ini bisa saja kepada partai yang mencalonkannya, tetapi juga kepada daerah (etnisitas) yang mendukungnya, lembaga-lembaga yang terkait dengan

dirinya, bahwa juga memungkinkan sudah ada kontrak politik dengan lembaga-lembaga eksekutif yang mendampinginya. Melalui data-data dan pemahaman ini, maka pengungkapan kasus korupsi terhadap seseorang akan semakin mudah dilacak dan ditemukan pola dan strategi yang dilakukannya.

C. KESIMPULAN

Keberadaan wacana korupsi dan anti-korupsi yang sering hadir di tengah masyarakat, membuat fenomena tidak selalu memuat substansi yang sebenarnya, karena tampilan (citra) terkadang lebih mengemuka daripada substansi itu sendiri. Oleh sebab itu, persoalan wacana tentang korupsi haruslah dipandang sebagai simbol identitas suatu kelompok. Melalui cara pandang ini, maka gerakan anti-korupsi harus dilakukan secara komunal (korupsi satu semuanya harus dikenai) atau dilakukan dengan cara menekan rasa komunalisme pelaku korupsi (bukan melihat Nazaruddin nya tapi melihatnya sebagai anggota DPR).

Penawaran cara yang demikian, berangkat dari pandangan bahwa persoalan korupsi bukanlah persoalan individual, tetapi

lebih sebagai persoalan komunal (kelompok social). Artinya, individu mau korupsi karena ada dukungan nilai-nilai komunalnya (material lebih bergengsi), sebaliknya kelompok social juga menciptakan kondisi bagi individu untuk melakukan korupsi (sogok biar cepat selesai). Oleh sebab itu, persoalan korupsi haruslah disikapi secara arif, karena sebagai tindakan yang dilegitimasi maka korupsi sangat berpotensi melahirkan ketidakadilan dan ketidakmerataan sosial. Ketidakadilan, karena korupsi yang dilakukan secara bersama (korupsi berjamaah) sangat berpotensi hanya dilekatkan dan dikenakan pada individu tertentu. ketidakmerataan, karena akibat korupsi membuat hak bersama terkebiri dan dimiliki oleh individu tertentu saja.

Oleh sebab itu, upaya penyadaran kepada masyarakat akan dampak negatif dari penguatan wacana yang dikembangkan oleh kelompok tertentu, perlu disikapi secara arif. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara memberi kesadaran kritis untuk selalu mempertanyakan substansi realitas empiris yang tampil dihadapan kita semua. Wasalam, semua artikel ini bisa membuka wawasan baru bagi kita tentang banyak persoalan yang muncul dihadapan kita.

D. SUMBER BACAAN

Haller, Dieter and Cris Shore. 2005. *Corruption, Anthropological Perspectives*. London: Pluto Press

Friedman, Jonathan. 1994. *Cultural Identity and Global Process*. London: Sage Publication.

Ricoeur, Paul. 2002. *Filsafat Wacana. Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa* (terjemahan dari bukunya : *Discourse and the Surplus of Meaning*). Yogyakarta: IRCISoD.

Gibbons, Michael T (ed). 2002. *Tafsir Politik. Telaah Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Qalam.